



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

Disusun oleh :

**BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN  
POLITIK  
KABUPATEN BONE**



# DAFTAR ISI

ii

**Kata Pengantar**

1-6

**Pendahuluan**  
BAB I

51-52

**Penutup**  
BAB IV

7-14

**Perencanaan Kinerja**  
BAB II

53

**Lampiran**  
DATA DUKUNG

15-50

**Akuntabilitas Kinerja**  
BAB III

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Bone



**DR.H. A. SUMARDI SUAIB, MM**





# BAB 1



An aerial photograph of a white building with a red roof. The building has several windows and a small entrance. A blue car with 'POLISI' written on it is parked on the street in front of the building. The car is surrounded by orange traffic cones. The background shows a paved area and some greenery.

# PENDAHULUAN

# LATAR BELAKANG

## A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. LKjIP Tahun 2022 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kerja dan capaian kinerja pegawai Bakesbangpol Kabupaten Bone Tahun 2022.

“Berikut dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi(LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:”

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No. 29 Tahun 2014  
Tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014  
Tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas LKIP



LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## B. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik berada pada aturan peralihan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :



- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Ketahanan Nasional.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan serta Ketahanan Nasional.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

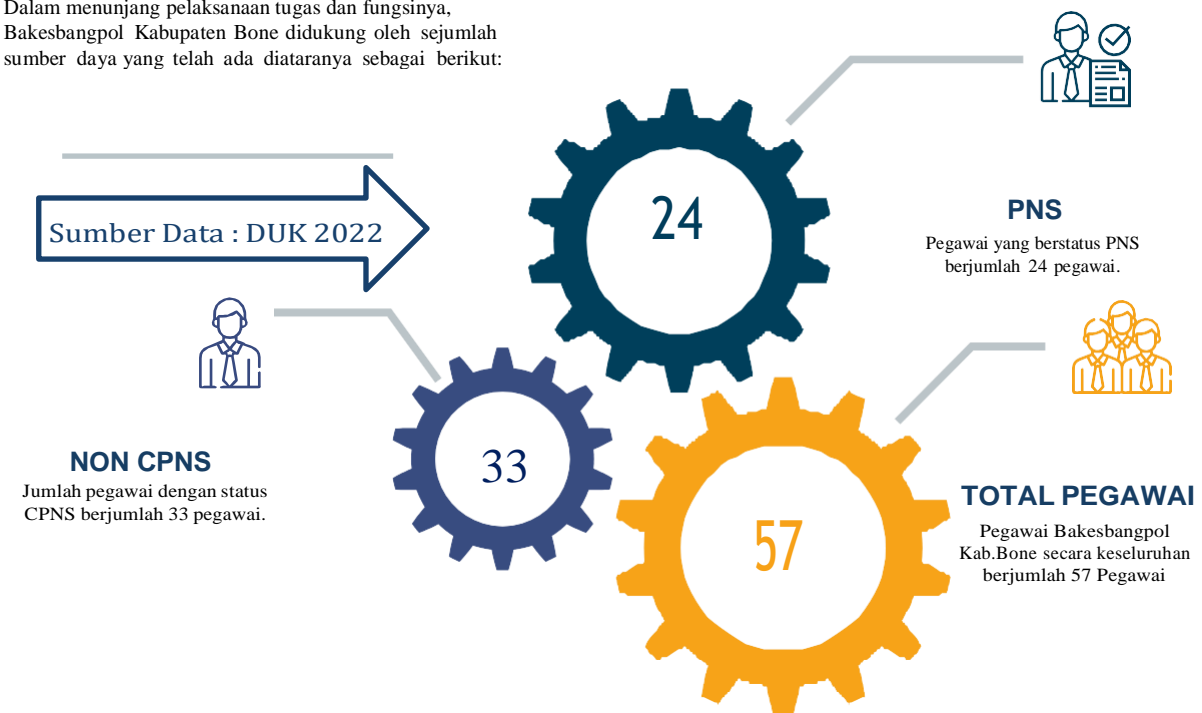


## A. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Bone

### a. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

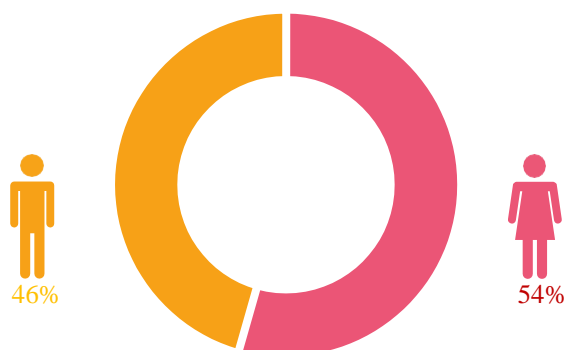
#### PERSONIL/PEGAWAI BAKESBANGPOL

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Bone didukung oleh sejumlah sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut:



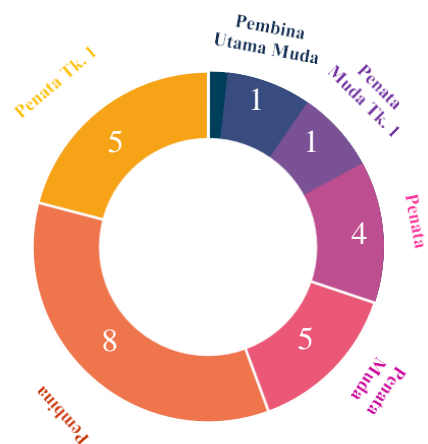
#### Perbandingan

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



#### Perbandingan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan/Pangkat/Golongan



### C. Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.



#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

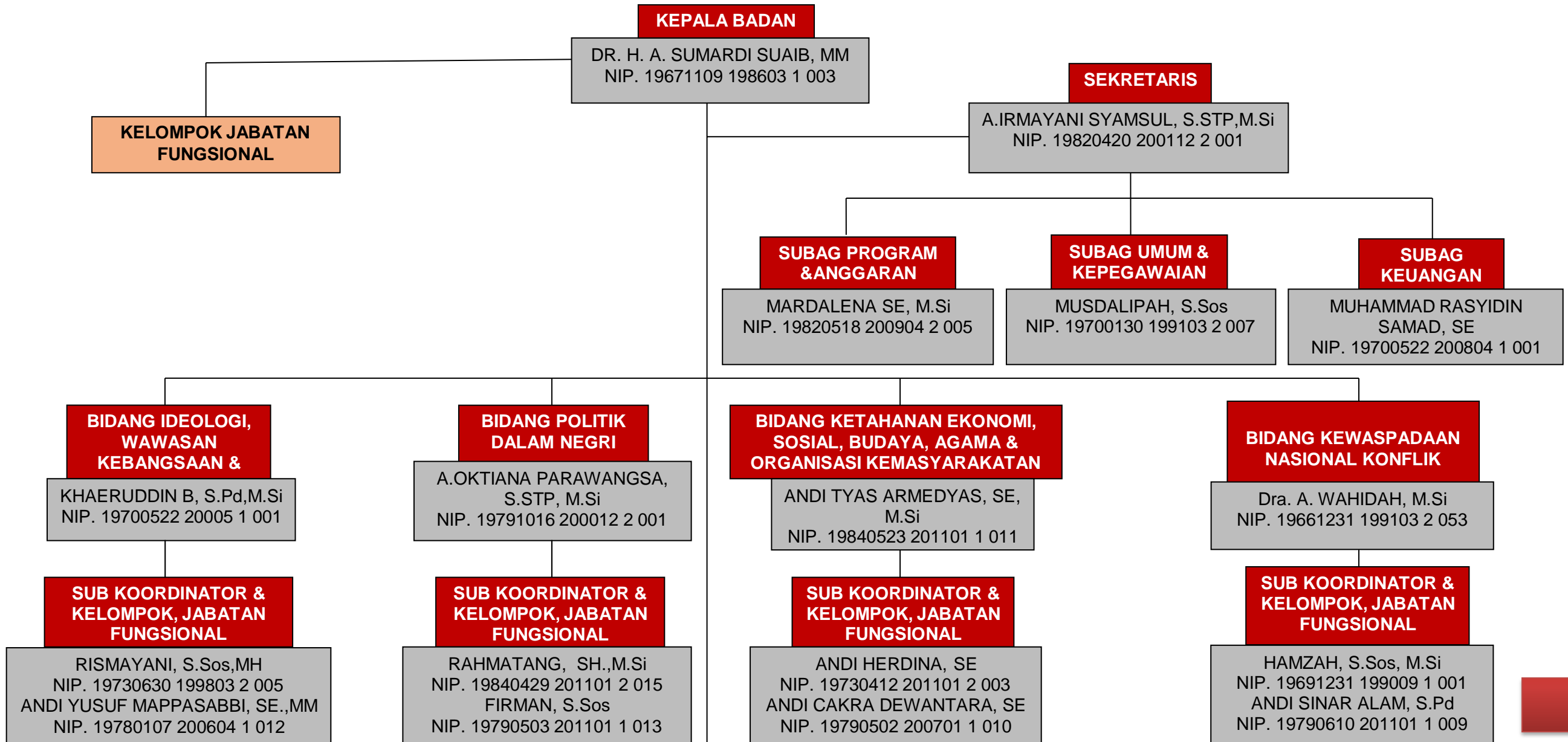
Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung serta meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai -nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat.  
Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap Ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang Ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai pertauran tentang Ormas.
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan daerah
6. Penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitas ketahanan ekonomi , seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba(narkotika dan zat adiktif lainnya).



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone  
( Perbup No. 99 Tahun 2021)





# BAB II





# PERENCANAAN KINERJA



## A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

### VISI

**“ Masyarakat Bone  
Yang Mandiri,  
Berdaya Saing, dan  
Sejahtera ”**

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Bone adalah :

### MISI

Berikut rumusan misi upaya - upaya untuk pembangunan daerah yang akan ditempuh oleh Bakesbangpol Kabupaten Bone:

**1**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

**6**

Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			Pada Tahun Ke -			
			2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	47%	52%	57%	62%
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	6,8	7,8	8,8	9,9
2	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	B	B	BB	BB

*Sumber Data: Renstra Perubahan 2018 – 2023*

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ( KKN )			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan tugas pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajuan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik sehingga tercipta budaya politik demokratis dan berkesinambungan	Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Meningkatkan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bone	Peningkatan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone

Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbangpol 2018-2023





### **C. Indikator Kinerja Utama**

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

### IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dan Parpol	Persentase ORMAS/LSM yang Berpartisipasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan Tahun Tersebut}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ketahanan Ekonomis, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Orpol yang Berpartisipasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang aktif Mendapat Pembinaan}}{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang Terdaftar}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Politik Dalam Negri	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan Yang Berperan Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ketahanan Ekonomis, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Pelatihan Bela Negara	<p>Jumlah Peserta yang telah Bersertifikat Pelatihan Bela Negara</p>  <p>X 100 %</p> <p>Jumlah Aparat &amp; Perwakilan LSM/Ormas</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Menjngkatnya Antisipasi Konflik Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	<p>Jumlah Konflik Sosial yang Tertangani</p>  <p>X 100 %</p> <p>Jumlah Konflik Sosial Keseluruhan</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Inspektorat Kab.Bone	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Data : Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023

#### D. Perjanjian Kinerja

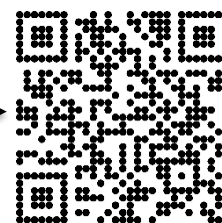
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	57	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsayarakatan	1.794.388.000
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.464.076.055
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	130.702.750
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	8.8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	373.670.350

Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.151.041.600
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	4.381.139.329
				<b>Jumlah</b>	<b>10.295.018.084</b>

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2022



#### E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$X < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$





# **BAB III**



# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2022 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bakesbangpol pada tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meliputi :



**MENINGKATNYA ANTISIPASI KONFLIK  
UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT**

**Persentase Konflik Sosial yang  
Tertangani**

**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS  
KINERJA DAN KEUANGAN URUSAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP**

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	57	71	125	Sangat tercapai/ sangat berhasil
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	8,8	5,7	64	Cukup Tercapai /Cukup Berhasil
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil



Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	BB (5)	A (6)	A(120)	Sangat Tercapai /berhasil
<b>Rata - Rata</b>					<b>101,5% Sangat Tercapai/Berhasil</b>	

*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022*

Berdasarkan data diatas, rata – rata capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Mencapai Target (101,5%). Untuk penjelasan setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 dengan Indikator 1 “Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Aktif” dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 125% dengan realisasi sebesar 71% dari target 57%
2. Sasaran 1 indikator 2 “Persentase orpol yang berpartisipasi aktif ” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%
3. Sasaran 2 indikator 1 “Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%
4. Sasaran 2 indikator 2 “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara” dalam kategori *cukup berhasil*, yaitu tercapai 64% dengan realisasi sebesar 5,7% dari target 8,8%
5. Sasaran 3 indikator 1 “Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat” menunjukkan predikat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.
6. Sasaran 4 indikator 1 “capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” dalam kategori *Sangat berhasil*, yaitu tercapai 120% dengan realisasi sebesar A(6) dari target BB (5)

## **2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkat nya partisipasi lembaga kemasyara katan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25	25	47	61	71	-	100	100	117	125	-
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	80	80	100	80	100	-	100	100	80	100	-
Meningkat nya nilai - nilai kebangsaa n dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80	80	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	4,5	5,6	6,7	5,7	5,7	-	100	100	73	64	-
Meningkat nya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyaraka t	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
Meningkat nya akuntabilit as kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	CC	BB	BB	A	-	75	100	100	120	-

*Sumber Data : Data Capaian Kinerja Diolah oleh Kesbangpol Tahun 2023*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2022 bahwa pada

1. Sasaran Pertama dengan Indikator “Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif” dimulai dari tahun 2019-2022 dengan kondisi realisasi kinerja mengalami kenaikan secara signifikan diikuti dengan kenaikan capaian pada tiap tahunnya.
2. Sasaran pertama dengan Indikator “Persentase orpol yang berpartisipasi aktif” pada realisasinya mengalami keadaan fluktuatif pada tiap tahunnya dimulai dari tahun 2019-2022, namun pada capaiannya mengalami kenaikan meskipun ditahun 2021 sempat mengalami penurunan.
3. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif” data dari tahun 2019-2022 menunjukkan adanya pemningkatan realisasi pada setiap tahunnya, dan capainnya berada pada keadaan yang stagnan.
4. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Bela Negara” dimana realisasinya dimulai pada tahun 2019-2022 mengalami keadaan yang fluktuatif sehingga capaiannya pun mengalami penurunan tiap tahunnya.
5. Sasaran ketiga dengan indicator “Persentase Konflik Sosial yang Tertangani” realisasi maupun capaiannya dimulai dari tahun 2019-2022 mengalami keadaan yang stagnan.
6. Sasaran keempat dengan indicator “Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” juga mengalami kenaikan tiap tahunnya pada realisasi maupun capaiannya.

#### **Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target  
Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA					CAPAIAN PERBANDINGAN TARGET JANGKA MENENGAH
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol								3,45
	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	62	25	47	61	71	-	
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	80	100	80	100	-	
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara								3,1
	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	80	100	100	100	-	
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	9,9	5,6	6,7	5,7	5,7	-	
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat								1

	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik								3,8
	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB	CC	BB	BB	A	-	

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Kinerja*

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2021 ada yang telah mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama dengan Indikator “Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif” dengan nilai realisasi pada tahun 2022 sebesar 71% yang artinya dalam kondisi Cukup Tercapai/Cukup Berhasil.
2. Sasaran pertama dengan Indikator “Persentase orpol yang berpartisipasi aktif” pada realisasinya ditahun 2022 yakni 100% menunjukkan keadaan yang Tercapai/Berhasil
3. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif” pada realisasinya ditahun 2022 sebesar 100% juga telah menunjukkan keadaan yang Tercapai/Berhasil
4. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Bela Negara” pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 5,7% dan termasuk dalam kategori Tidak Tercapai/Tidak Berhasil
5. Sasaran ketiga dengan indicator “Persentase Konflik Sosial yang Tertangani” realisasi pada tahun 2022 sebesar 100 % juga telah berada pada keadaan yang Tercapai/Berhasil
6. Sasaran keempat dengan indicator “Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” pada realisasinya di tahun 2022 dengan nilai A atau sama dengan 120% telah Tercapai/Berhasil

#### **4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa dalam mengukur capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal  
/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	71	-	-
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	-	-
2	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	-	-
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	5,7	-	-
3	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	A	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

#### **5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	RATA - RATA CAPAIAN %	PREDIKAT			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol			112,5	✓			
	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	125					
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100					
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara			82			✓	
	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100					
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	64					
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat			100		✓		
	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100					

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik			*A 120	√			
	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	120					
	Rata-Rata Capaian Kinerja		103,6		√		

*Sumber Data : Laporan Realisasi Evaluasi Kinerja*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dalam kategori *Cukup Berhasil, Berhasil dan Sangat Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Sasaran 1.1

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan" dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat *Berhasil dan Sangat Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 125%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### a) Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring terhadap Ormas/LSM yang telah terdaftar dan tidak terdaftar sehingga dapat berpartisipasi secara aktif.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 125% dengan realisasi sebesar 71% dari target 57% hal ini karena:

1. Partisipasi Ormas / LSM yang aktif melakukan kegiatan dan melaporkan semua kegiatannya mencapai 100 Ormas/LSM dari 140 Ormas/LSM
2. Pelaksanaan Monitoring kepada semua Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Bone



**Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Ormas**



**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas**

Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih terdapat Ormas/LSM yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
2. Masih ada Ormas / LSM yang belum mampu menunjukkan surat domisi keberadaan sekretariat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif antara lain:



1. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
2. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”

**b) Persentase orpol yang berpartisipasi aktif**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Partai Politik yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Hibah Parpol.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Terdapat 15 Parpol yang terdaftar.
2. Parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah hanya 12 parpol sehingga ada 3 parpol yang tidak aktif.



**Kegiatan Penyerahan Hibah Parpol**



## Kegiatan Pendidikan Politik

Pencapaian di atas telah mencapai target dibandingkan dengan tahun lalu, namun meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya dikarenakan :

1. Masih terdapat Partai Politik yang tidak berpartisipasi aktif.
2. Masih terdapat Partai Politik yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase orpol yang berpartisipasi aktif antara lain:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.

### 2) Sasaran 2

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara” dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat *Berhasil dan Cukup Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 80%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### a) Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Etnis di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lembaga Keagamaan yang terbentuk Forum Kerukunan antar Umat Beragama.



**Pemberdayaan FKUB Dalam Rangka  
Mensukseskan Semarak Merah Putih**



**Webinar Pemberdayaan FKUB Dalam  
Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2024**

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya adalah Kurangnya sarana dan prasaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan Melakukan rapat koordinasi dengan FKUB.

**b) Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara**

**Definisi:** Pelaksanaan Pelatihan Bela Negara kepada Aparat Pemerintah Kabupaten yang sudah berlangsung selama 5 Angkatan dengan dengan jumlah keseluruhan yang telah mengikuti Belneg sebanyak 440 orang dalam rangka menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara dalam kategori *cukup berhasil*, yaitu tercapai 64% dengan realisasi sebesar 5,7% dari target 8,8% hal ini karena:

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Bela Negara pada Tahun 2022 tidak ada sehingga kegiatan dimaksud tidak ada.. sehingga Pelatihan Bela Negara tidak dapat dilaksanakan.



### Kegiatan Pelatihan Bela Negara Dua Tahun Silam

Adapun upaya pencapaian target dikemudian hari, maka perlu adanya hal-hal dibawah ini:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan bela negara Aparatur dan LSM berpartisipasi aktif dalam mengikuti Pelatihan Bela Negara
2. Semua peserta yang mendapat panggilan untuk pelatihan bela negara bersedia untuk ikut.
3. Memaksimalkan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagai bentuk Bela Negara secara Virtual.
4. Melaksanakan Pendidikan kesadaran bela negara bagi para siswa SMA dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air.

### 3) Sasaran 3

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat” dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.



Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**a) Persentase Konflik sosial yang tertangani**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda, Forkopimcam dan anggota KOMINDA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam menangani Konflik Sosial di Kabupaten Bone .

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda Bersama stakeholder terkait dalam membahas permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi.
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota KOMINDA.
3. Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Bersama Forkopimcam dalam pembahasan permasalahan permasalahan di daerah.



**Kegiatan Rapat Forkopimda**





**Kegiatan Rapat Koordinasi  
FORKOPIMDA Bersama  
FORKOPIMCAM**



**Pemantauan Malam Natal**

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya prasarana dalam pelaksanaan monitoring ke desa desa terpencil dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
  2. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.
- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Konflik sosial yang tertangani.
1. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
  2. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.

#### **4) Sasaran 4**

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik” dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat Sangat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

##### **a) Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan perbaikan laporan akuntabilitas yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dalam kategori *Sangat berhasil*, yaitu tercapai A (120) dengan realisasi sebesar A(6) dari target BB(5) hal ini karena:

1. Tersedianya data yang dibutuhkan oleh tiim Audit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja
2. Tersajinya laporan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Koordinasi dan asistensi dengan semua Perangkat Daerah



### Kegiatan Pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP.

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
2. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
3. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

**Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI SUMBER DAYA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	%
a	b	c	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	57	71	125	1.794.388.000	1.747.553.999	97	28
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	100	100	1.464.076.055	1.458.075.655	99	1
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	100	100	130.702.750	97.306.000	74	26
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	8,8	5,7	65	373.670.350	371.901.750	99	-
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	2.151.041.600	2.136.963.372	99	1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB (5)	A (6)	A(120)	4.381.139.329	4.314.595.632	98	(22) Efisien
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>99,16%</b>			<b>94%</b>	

*Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2022*

Berdasarkan hasil Analisa efisiensi penggunaan sumber daya ( anggaran ) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 125% dan capaian anggaran 97% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3% dan efisiensi sumber daya sebesar 28 %.
2. Indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1% dan efisiensi sumber daya sebesar 1 %.
3. Indikator Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 74% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 26% dan efisiensi sumber daya sebesar 26 %.
4. Indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara dengan capaian kinerja 65% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0% dan efisiensi sumber daya sebesar -34%.
5. Indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1% dan efisiensi sumber daya sebesar 1%.
6. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dengan capaian kinerja A(120) dan capaian anggaran 98% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2% dan efisiensi sumber daya sebesar 22%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.7 Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif							
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif							
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif							
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara							



2	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani							
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP							
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( % )</b>	%	100	100	100	
			<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun</b>	%	100	100	100	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	Dokumen	4	4	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun	Dokumen	2	2	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik

		3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
		4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	Dokumen	3	3	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>SUB KEGIATAN</b>						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	Laporan	14	14	100	Tetap memperhatikan tahapan waktu yang telah diberikan
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	
		<b>SUB KEGIATAN</b>						

			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Baju seragam (lembar)	Lembar/Pcs	57	57	100	Tetap memperhatikan kesesuaian pagu dengan pengadaan pakaian dinas
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya

		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi Bakesbangpol dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	500	732	146	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>SUB KEGIATAN</b>						
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	3	100	Memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas
		2. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	1	1	100	Memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan Mebel
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>SUB KEGIATAN</b>						

		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Rekening	48	48	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
		<b>SUB KEGIATAN</b>						
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kegiatan	21	9	42	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	25	16	64	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	1	100	Memperhatikan pelaksanaan atau pun pengadaan pada sub kegiatan ini



2			<b>PROGRAM : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Ideologi Wawasan Kebangsaan ( % )</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	4	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
			2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksanan sesuai dengan jadwal perencanaan
			3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

			3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana setelah pandemi covid-19 berakhir
			4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal perencanaan
3			<b>PROGRAM : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

			Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	100	100	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	2	2	100	Tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pembagian pagu sesuai dengan kesepakatan bersama

			2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan	1	1	100	Tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan agar dapat terlaksanan sesuai dengan time line yang ada
			3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan	1	1	100	Diharapkan peserta parpol dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendaftaran parpol
			<b>PROGRAM : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)</b>	%	80	100	125	
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	%	80	100	125	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						

			1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	100	Diharapkan kedepannya ormas bisa diberikan sosialisasi terkait kelengkapan berkas permohonan dana bantuan hibah
			<b>PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)</b>	%	85	100	118	
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	%	85	100	118	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	100	Tetap mempertahankan jadwal pelaksanaan agar terlaksana sesuai dengan time line yang ada



			2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	100	Tetap mempertahankan jadwal pelaksanaan agar terlaksana sesuai dengan time line yang ada
4			<b>PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (%)</b>	%	85	100	118	
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	%	85	100	118	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	1	100	Tetap menjaga kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan

			2. Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya
			3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana dengan baik
			4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah

### **Upaya Perbaikan Berikutnya**

Mengoptimalkan peranan Tim Terpadu untuk segera melaksanakan pengawasan baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Selain itu, sering mengadakan sosialisasi baik formal maupun informal kepada Ormas dan Orpol tentang peranan Ormas dan Orpol dalam pembangunan Kabupaten Bone serta meningkatkan pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada semua kalangan masyarakat yang ada di lingkup Kabupaten Bone.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 10.295.018.084,-** ( Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah ) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.2 Realisasi Anggaran**

URAIAN	JUMLAH		PERSEN
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol			
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara			
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis teknologi informasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik			
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.794.388.000	1.747.553.999	97
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.464.076.055	1.458.075.655	99
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	130.702.750	97.306.000	74
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	373.670.350	371.901.750	99
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.151.041.600	2.136.963.372	99
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	4.381.139.329	4.314.595.632	98
<b>TOTAL</b>	<b>10.295.018.084</b>	<b>10.126.396.408</b>	<b>94%</b>





# BAB IV



A large bronze statue of a Native American man, likely a warrior, standing on a pedestal. He is holding a long spear in his right hand. The statue is set against a blue sky with some clouds. The pedestal is made of stone and has some inscriptions on it. The word "PENUTUP" is overlaid in large white letters on the left side of the image.

**PENUTUP**

### A. Simpulan Umum

Secara umum, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 adalah **Sangat Berhasil** dengan pencapaian nilai sebesar **(99,16%)** dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena ada dua Sasaran memenuhi kriteria **Sangat Berhasil**, sedangkan indikator lainnya memenuhi kriteria **Berhasil** dan **Cukup Berhasil**. Untuk sasaran Pertama dengan “Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol” dengan nilai sebesar **(125%)** dan Sasaran keempat yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik” berada pada predikat **Sangat Berhasil** dengan besaran nilai sebesar **(120%)**. Untuk kategori **Berhasil** dengan nilai sebesar **(100%)** diberikan untuk Sasaran ketiga yakni “Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”. Dan untuk sasaran kedua “Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” mendapat predikat **Cukup Berhasil** dengan nilai **(65%)**. Sehingga rata-Rata pencapaian Kinerja yang diperoleh Badan Kesbangpol pada tahun 2022 termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

### B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan dan Sub. Kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam memperoleh predikat disetiap sarannya yakni :

1. Untuk sasaran pertama “Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol” **(125%)** dan Sasaran keempat yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik” **(120%)** berada pada predikat **Sangat Berhasil**. Dalam mewujudkannya kendala yang dihadapi yakni:

- a. Masih terdapat Ormas/LSM yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
- b. Masih ada Ormas / LSM yang belum mampu menunjukkan surat domisi keberadaan sekretariat.
- c. Masih terdapat Partai Politik yang tidak berpartisipasi aktif.
- d. Masih terdapat Partai Politik yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah.
- e. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah

Untuk upaya dalam pencapaiannya yakni:

- a. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
  - b. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”
  - c. Melaksanakan Bimbingan Tekhnis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
  - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.
  - e. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
  - f. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
  - g. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan
2. Sasaran Ketiga “Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dengan predikat **Berhasil (100%)**, hambatan dalam pelaksanaannya adalah :
- a. Masih kurangnya prasarana dalam pelaksanaan monitoring ke desa desa terpencil dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
  - b. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.
- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Konflik sosial yang tertangani.

- a. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
  - b. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.
3. Sasaran kedua “Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” mendapat predikat **Cukup Berhasil (65%)**. Hal ini disebabkan oleh kendala yangdihadapi adalah :

Kurangnya sarana dan prasaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan Melakukan rapat koordinasi dengan FKUB.

Hal ini juga diperparah oleh salah satu Indiktor pada sasaran ini yakni “**Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara**” yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan:

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Bela Negara pada Tahun 2022 tidak ada sehinnnga kegiatan dimaksud tidak ada, sehingga Pelatihan Bela Negara tidak dapat dilaksanakan

Namun, untuk mengatasinya, hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan bela negara Aparatur dan LSM berpartisipasi aktif dalam mengikuti Pelatihan Bela Negara
- b. Semua peserta yang mendapat panggilan untuk pelatihan bela negara bersedia untuk ikut.
- c. Memaksimalkan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagi bentuk Bela Negara secara Virtual.
- d. Melaksanakan Pendidikan kesadaran bela negara bagi para siswa SMA dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan laporan tahunan. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* serta meningkatkan kinerja Bakesbangpol Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

**Lampiran :**

- 1). Renstra Perubahan 2018-2023
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Pengukuran Rencana Aksi
- 5). Capaian Kinerja
- 6). IKU
- 7). Pohon Kinerja
- 8). Rencana Aksi
- 9). Renja
- 10). Lampiran lainnya, dll.